

# Prosiding

ISBN : 978-602-19441-1-0

## Seminar Nasional

# Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

**Magister Teknik Sipil  
Universitas Lampung**

**Hotel Novotel - Bandar Lampung  
3 Mei 2012**

Organized by:



**Lampung Post**



Prosiding Seminar Nasional  
Magister Teknik Sipil Universitas Lampung

**"Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah"**

03 Mei 2012, Hotel Novotel - Bandar Lampung

**Pengarah:**

1. Gubernur Provinsi Lampung (Drs. Sjachroedin ZP.,SH)
2. Dekan Fakultas Teknik Unila (Dr. Lusmeilia Afriani,D.E.A.)
3. Ketua Bappeda Provinsi Lampung (Ir. Fahrizal Darminto, MA)
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Drs. Ishak, MH)
5. Ketua KIAT Fakultas Teknik Unila (Ir. Hi. Berlian Tihang, MM)
6. Ir. Anshori Djausal, MT
7. Wakil Pimpinan Umum Lampung Post ( Bpk. Djadjat Sudradjat)
8. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Unila (DR. Dyah Indriana K. S.T.,M.Sc.)
9. Ketua HPJI (Ir. A. Lianurzen, MT)

**Penyunting:**

1. Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T.,M.Sc.
2. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T.,M.T.
3. Ir. Ahmad Zakaria, Ph.D.
4. Siti Nurul Khotimah, S.T.,M.Sc.

**Cover Designer & Editor:**

Moh. Andi Susanto

**ISBN :978-602-19441-1-0**

Sekretariat:  
Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng  
Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 704947, Fax (0721) 704947, ext 225

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat-Nya kepada kita semua. Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Magister Teknik Sipil Universitas Lampung bekerja sama dengan Lampung Post telah menyelenggarakan Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Bandar Lampung pada tanggal 3 Mei 2012. Seminar Nasional ini dihadiri oleh para ahli, akademisi, praktisi, maupun profesional di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta sektor terkait.

Artikel ilmiah yang disajikan pada seminar ini meliputi segala aspek yang berkaitan dengan infrastruktur dan pengembangan wilayah yaitu kebijakan dan kerjasama pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, infrastruktur dan moda transportasi dalam mendukung pengembangan wilayah, serta daya dukung lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Presentasi serta diskusi yang berlangsung selama seminar ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep, strategi, maupun berbagi pengalaman tentang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Indonesia umumnya, dan di provinsi Lampung khususnya. Terima kasih kepada panitia pelaksana, panitia pengarah, dewan penyunting, penulis artikel serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seminar ini.

Bandar Lampung, 10 Mei 2012  
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil  
Universitas Lampung

Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
<b>Nama</b>	<b>Judul</b>
<b>1. Kebijakan dan Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	
Agus Triono	1
	PRESPEKTIF HUKUM TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Eka Kurniawan	11
	PENGEMBANGAN INDUSTRI SEKUNDER BERBASIS KOMIDITI KOPI DALAM UPAYA MEMBANGUN KLUSTER EKONOMI ANDALAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Eko Bagus Delianto	19
	KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) STUDI KASUS: INFRASTRUKTUR AIR MINUM
Kristianto Usman	36
	STUDI PENYUSUNAN <i>MASTER PLAN</i> TERMINAL AGRIBISNIS (TA) DI PENENGAHAN-LAMPUNG SELATAN
Lukman Hakim	46
	ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA, DAN SEKTOR UNGGULAN : STUDI PROVINSI LAMPUNG
Marlia Eka Putri A.T.	51
	KONSEP HUKUM PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN OTONOMI DAERAH
Moh. Waspa Kusuma Budi	57
	JEMBATAN SELAT SUNDA DAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI PROVINSI LAMPUNG
Muhammad Hutri	63
	MODEL KEUNTUNGAN DAN <i>OVERHEAD</i> DALAM MENYUSUN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA INSTANSI PEMERINTAH

Nelia Aida	PENGARUH <i>SPILLOVER EFFECT</i> PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG	75
Nurmayani	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DI PROPINSI LAMPUNG	87
Selvi Diana Meilinda	PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KEBIJAKAN GENDER (Evaluasi Pengarusutamaan Gender dalam Program <i>Rural Infrastructure Support</i> PNPM Propinsi Lampung)	94
Upik Hamidah	PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH	109
Yuda Romdania	ANALISA EKONOMI TEKNIK PADA KAWASAN <i>WATER FRONT CITY</i>	122
<b>2. Infrastruktur dan Moda Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Wilayah</b>		
Abdul Mukahfi	ANALISIS BERBAGAI PEMICU KEMACETAN DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM BANDAR LAMPUNG	130
Andius Dasa Putra	EVALUASI TEKNIS FASILITAS SISI UDARA UNTUK DAPAT DIDARATI PESAWAT BERBADAN LEBAR ( <i>WIDE BODY AIRCRAFT</i> ) (Studi Penyiapan Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji Provinsi Lampung)	137
Anwarudin	MODEL PENGEMBANGAN TERPADU TERMINAL KHUSUS CPO PADA PELABUHAN MULTIPURPOSE EKSISTING	147
Budi Aji Purwoko	PENINGKATAN SISTEM INTERLOKING DAN HUBUNGAN BLOK PERSINYALAN MIS 801 DI STASIUN SEMARANG TAWANG (STUDI KASUS ALAT PENDETEKSI SARANA KERETA API)	157
Djarot Tri Wardhono	VARIABEL-VARIABEL DALAM PENERIMAAN <i>SMART CARD</i> DENGAN <i>THEORY PLANNED BEHAVIOUR</i> (TPB)	166

Fandi Suratman	SARANA TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG	173
Ginta Wiryasenjaya Gazali	LAMPUNG <i>CONNECTION</i> BAKAUHENI-SUKADANA-MENGGALA-BALAMBANGAN UMPU	178
Hanif Adi Yudhitami	PENINGKATAN AKSESIBILITAS ZONA 1 DAN ZONA 8 DI KABUPATEN NGAWI	186
I Made Suraharta	EVALUASI SISTEM JALAN ARTERI DENGAN BEBERAPA SIMPANG YANG DIKENDALIKAN DENGAN SISTEM TUNGGAL (STUDI KASUS : KORIDOR JALAN GATOT SUBROTO BARAT KOTA DENPASAR, BALI)	195
I.B. Ilham Malik	PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN MEGAPROYEK INFRASTRUKTUR LAMPUNG	211
Ida Susanti	PENGARUH INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI BAGI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	219
Lucia Nathania C. A	JEMBATAN SELAT SUNDA	223
Marulin Febrita	ANALISA TINGKAT KEBISINGAN PADA DAERAH YANG BERDEKATAN DENGAN REL KERETA API (STUDI KASUS : LINTAS JAKARTA KOTA – MANGGARAI)	229
Muhammad Baqiyudin Nadjib	KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS: WADUK JATIGEDE)	239
Muiz Thohir	MENGEMBANGKAN <i>TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT</i> DI KORIDOR JEMBATAN SELAT SUNDA	248
Rahayu Sulistyorini	PELUANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI INTERMODA DI PROPINSI LAMPUNG	255
Restita Winandi	TINJAUAN KEBERADAAN MALL RAMAYANA ROBINSON TERHADAP ASPEK PEDESTRIAN AREA DAN PARKIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG	268

Sri Susanti	ANALISA TINGKAT AKSESIBILITAS DAN KARAKTERISTIK PENUMPANG BRT TRANS BANDAR LAMPUNG	275
Tas'an Junaedi	KONDISI DAN KINERJA TRANSPORTASI DI DAERAH OTONOMI BARU (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)	283
<b>3. Daya Dukung Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>		
Agus Sugiri	PEMBUATAN MESIN PENYANGRAI KACANG TANAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA MUTARALAM KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT	292
Ahmad Zaenudin	PENCITRAAN RESISTIVITAS BAWAH PERMUKAAN UNTUK MONITORING BADAN JALAN LINTAS SUMATERA -LAMPUNG SELATAN	297
Ahmad Zakaria	SIMULASI WAKTU PERAMBATAN DAN TINGGI GELOMBANG TSUNAMI AKIBAT MELETUSNYA GUNUNG ANAK KRAKATAU	306
Bagus Sapto Mulyatno	PENENTUAN <i>AQUIFER</i> AIR TANAH DI DAERAH LAMPUNG TENGAH DENGAN METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS	315
Citra Dewi	PERANAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL DALAM Mendukung KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	321
Citra Persada	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH METROPOLITAN BANDARLAMPUNG YANG BERKELANJUTAN	326
Dwi Joko Winarno	KAJIAN HIDRO-OSEANOGRAFI PASANG SURUT DAN ARUS PASANG SURUT DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN DI TELUK LAMPUNG	340
Dyah Indriana Kusumastuti	SIGNIFIKANSI ANALISIS HIDROLOGI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI LAMPUNG	350

Laksmi Irianti	PERBANDINGAN KETAHANAN SULFAT PADA BETON YANG MENGGUNAKAN SEMEN PCC DENGAN BETON YANG MENGGUNAKAN SEMEN OPC+ FLY ASH	342
Lilies Widodojoko	MEKANISME PENYUSUTAN DAN PENGARUH <i>SET ACCELERATOR</i> PADA BETON TEMBAK	350
Muhammad Jafri	PENGARUH WAKTU PERENDAMAN PADA STABILISASI MENGGUNAKAN ABU GUNUNG MERAPI TERHADAP DAYA DUKUNG TANAH LEMPUNG ORGANIK	360
Muh Sarkowi	ANALISA KESTABILAN DAERAH RENCANA JEMBATAN SELAT SUNDA BERDASRKAN DATA GEOLOGI, GEOFISIKA DAN SEISMOLOGI	370
Nur Arifaini	KONSTRUKSI SLAB BETON SEBAGAI PELAPIS KEDAP AIR PADA TANAH DASAR JALAN KERETA API UNTUK MENCEGAH TERJADINYA MUD PUMPING	377
Pio Ranap Tua Naibaho	PERILAKU PERBAIKAN STRUKTUR BALOK KANTILEVER AKIBAT <i>OVERLOADING</i> DENGAN MENGGUNAKAN <i>CARBON FIBRE REINFORCED PLATE CROSS</i>	385
Ratna Widyawati	PERKUATAN STRUKTUR BETON AKIBAT ALIH FUNGSI BANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN BAJA STRIP	401
Rustadi	GEOLOGI BATUAN DAERAH TELUK LAMPUNG DAN KONSEKUENSI TERHADAP BAHAYA KEGEMPAAN	411
Siti Nurul Khotimah	DESAIN OPTIMAL DRAINASE PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	416
Suharno	RESIKO GEMPA BUMI DI PROVINSI LAMPUNG	430
Suharno	HIDUP NYAMAN DI LOKASI BERPOTENSI GEMPA BUMI TINGGI	440
Yohanes Martono Hadi	KINERJA JARINGAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI	449



# PERANAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL DALAM Mendukung KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Citra Dewi<sup>1</sup>, Siti Nurul Khotimah<sup>2</sup>

1. Program Studi D3 Survey dan Pemetaan Fakultas Teknik Universitas Lampung
2. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung

## Abstrak

Saat ini data dan informasi spasial di berbagai instansi pusat maupun daerah masih belum terintegrasi meskipun data tersebut telah tersedia di masing-masing instansi. Jika kondisi tersebut masih terus berlangsung maka akan sulit untuk menggunakan data spasial secara bersama dan duplikasi data spasial dalam suatu lokasi akan terus terjadi. Dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah tentunya membutuhkan data dan informasi spasial dari berbagai instansi yang menyediakan data dan informasi spasial. Untuk memudahkan akses data dan informasi spasial diperlukan suatu wadah yang dapat melakukan integrasi dan sharing data dan informasi spasial tersebut secara konsisten berkelanjutan. Proses integrasi data dan informasi spasial tersebut dapat dilakukan dengan membentuk jaringan infrastruktur data spasial secara nasional dalam bentuk Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN,) untuk mewujudkan ini tidaklah mudah, diperlukan penyatuan persepsi, koordinasi dan komunikasi dari semua unsur terkait. Pembangunan dan pengembangan IDSN seharusnya mampu menjamin tersedianya data dan informasi spasial yang berkualitas, mudah di akses dan diintegrasikan untuk menunjang pembangunan secara nasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai tingkat pusat maupun daerah. IDSN diselenggarakan oleh Bakosurtanal atau sekarang di sebut Badan Informasi Geospasial (BIG), Terselenggaranya BIG yang menggantikan BAKOSURTANAL saat ini diharapkan mampu menjadi koordinator serta penyalaras penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia.

**Keywords :** IDSN, pembangunan, JDSN

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah pada dasarnya merupakan suatu upaya agar dapat memberi nilai tambah terhadap kualitas kehidupan. Untuk melakukan pembangunan dengan baik diperlukan suatu perencanaan yang baik pula. Perencanaan pembangunan atau pengembangan suatu wilayah tidak terlepas dari pemanfaatan data spasial. Saat ini data dan informasi spasial di berbagai instansi pusat maupun daerah masih belum terintegrasi meskipun data tersebut telah tersedia di masing-masing instansi. Jika kondisi tersebut masih terus berlangsung maka akan sulit untuk menggunakan data spasial secara bersama dan duplikasi data spasial dalam suatu lokasi akan terus terjadi.

Infrastruktur data spasial nasional (IDSN) merupakan terobosan baru yang sedang digalakan saat ini agar setiap orang atau instansi dapat dengan mudah melakukan pengaksesan data spasial. Sasaran utama IDSN yaitu memudahkan pengguna data spasial menggunakan set data secara konsisten sesuai dengan kebutuhan, walaupun data spasial dibuat dan diarsipkan oleh berbagai instansi atau pihak yang berbeda. Penerapan IDSN memerlukan infrastruktur yang baik berdasarkan kebijakan dan manajemen, teknologi, sumberdaya manusia dan berbagai hal yang memungkinkan pengaksesan data spasial dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah. Konsep IDSN tidak untuk membangun pusat database tetapi untuk membangun jaringan distribusi database yang dikelola oleh pemerintah dan industri kustodian (B.J. Pratondo1, 2006).

Data spasial dikenal sebagai data geospasial atau informasi geografi. IDSN berperan dalam perolehan dan penyebarluasan informasi spasial (Bakosurtanal, 2004). Penerapan IDSN memerlukan suatu infrastruktur yang berperan dalam interkoneksi basis data yang terdistribusi dengan pemanfaatan informasi, komputer dan teknologi. Data spasial dapat menunjang sistem sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan perspektif pengguna, pengadaan data merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan alokasi waktu yang cukup lama, oleh karena itu konsep berbagi data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas (FGDC, 2004).

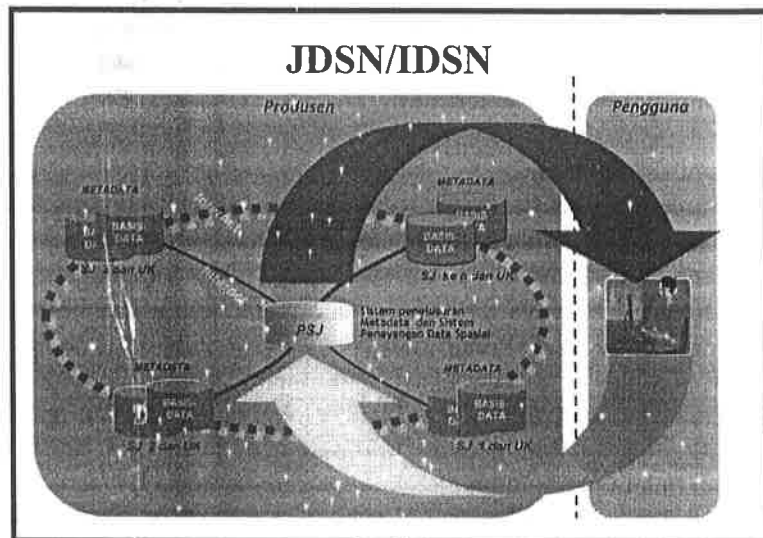
Penyelenggaraan IDSN dapat membentuk jaringan antar institusi yang terkait pada pengelolaan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang perencanaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pembagunan (merujuk pada tujuan penyelenggaraan nasional). Sasaran penyelenggaraan IDSN antara lain : tercapainya suatu tatanan penyelenggaraan informasi spasial secara terintegrasi, tersedianya data spasial yang memenuhi standar berlaku, Tercapainya kemudahan akses dan pertukaran spasial antar pembuat dan pengguna data.

Sebelum membangun IDSN, perlu dipahami tentang komponen-komponen IDSN terlebih dahulu yaitu: kelembagaan, peraturan perundangan-undangan, data utama, penelitian dan pengembangan teknologi, sumber daya manusia, yang dapat digambarkan seperti diagram berikut.



Gambar 1. Komponen IDSN

Kelembagaan dalam perpres jaring data spasial nasional (JDSN) disebutkan ada 3 (tiga), yaitu: Penghubung Simpul Jaringan (PSJ), Simpul Jaringan (SJ) dan Unit Kliring (UK) lihat gambar di bawah. Masing-masing Kelembagaan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Bakosurtanal atau sekarang Badan Informasi Geospasial (BIG) bertindak sebagai PSJ yang bertugas mengintegrasikan seluruh simpul jaringan, sedangkan SJ terdiri dari 14 Instansi Pemerintah Pusat penghasil data spasial dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sedangkan Unit Kliring ditetapkan oleh SJ masing-masing sebagai unit kerja yang bertindak sebagai pintu gerbang pertukaran data spasial.



Gambar 2. Kelembagaan JDSN/IDSN

Tugas Penghubung Simpul Jaringan; membangun sistem akses JDSN; memfasilitasi pertukaran data spasial; memelihara sistem akses JDSN; dan melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan. Tugas Simpul Jaringan ; melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial; melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidangnya; menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses JDSN; melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliringnya; dan melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya. Tugas Unit Kliring; Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan dalam hal pertukaran dan penyebarluasan data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan Unit Kliring oleh masing-masing Pimpinan Simpul Jaringan; Unit Kliring sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), bertugas menyebarkan metadata dan data spasial kepada masyarakat; dan menyampaikan Metadata itu kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang: survei dan pemetaan (BAKOSURTANAL/Badan Informasi Geospasial), pertanahan (BPN), pemerintahan dalam negeri (DEPDAGRI), perhubungan (DEPHUB), komunikasi dan informatika (DEPKOMINFO), pekerjaan umum (DEP PU), kebudayaan dan pariwisata (DEP BUDPAR), statistik (BPS), energi dan sumber daya mineral (DEP. ESDM), kehutanan (DEP HUT), pertanian (DEP TAN), kelautan dan perikanan (DKP), meteorologi dan geofisika (BMG), antariksa dan penerbangan (LAPAN), pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## 2. PEMBANGUNAN JDSN/IDSN

Pembangunan JDSN/IDSN akan berjalan dengan baik bila SJ setiap instansi di pusat maupun di daerah terbangun dengan baik pula. Proses JDSN/IDSN antara lain; pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD, penetapan unit kliring, pembuatan metadata, pembangunan clearinghouse (gateway/pintu gerbang) simpul jaringan, standarisasi data spasial. Pembangunan simpul jaringan pada program IDSN akan dimulai dengan

pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD. Anggota dari tim ini adalah merupakan perwakilan dari Dinas/SKPD pengelola data. Agar semua urusan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, maka tim ini akan terdiri dari tiga level, yaitu :

1. Tim Pengambil Kebijakan

Anggota Tim ini terdiri dari para Kepala Dinas/SKPD, berperan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan dalam hal pengelolaan data.

2. Tim Manager Menengah

Anggota Tim ini sebaiknya terdiri dari para penanggung jawab pengelolaan fisik data pada tiap Dinas/SKPD. Peran dari tim ini adalah sebagai perancang kegiatan operasional pembangunan simpul jaringan dalam kapasitas mendukung pembangunan IDSJ. Selain itu juga berperan dalam mengkomunikasikan kegiatan kepada tim pengambil kebijakan dan kepada tim operator. Peran tim ini sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan SJ.

Kegiatan inti dari tim ini antara lain mengkoordinasikan dalam hal: inventarisasi data pada Dinas/SKPD masing-masing, pembuatan metadata, pembangunan jaringan sistem secara elektronik (Intranet, Internet) yang tersambung dengan IDSJ, standarisasi data, dll.

3. Tim Operator

Anggota tim ini adalah para pelaksana tugas secara operasional yang berperan dalam kegiatan seperti inventarisasi data, pembuatan metadata, pembangunan jaringan elektronik (intranet, internet), pembuatan data yang standar sesuai standar nasional Indonesia (SNI). Khusus untuk SNI ini saat ini tim nasional standard sedang dalam progress pembuatan SNI.

Penetapan Unit Kliring yang akan bertindak sebagai pintu gerbang keluarnya segala informasi dan komunikasi data pada SJ perlu segera dilakukan untuk mengawali pembangunan. Cara pembentukannya adalah pimpinan wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) menunjuk salah satu dinas/SKPD untuk bertindak sebagai unit kliring. Penunjukan tersebut diadministrasikan melalui sebuah Surat Keputusan (SK) dari pimpinan wilayah. Pada surat keputusan tersebut selain menetapkan unit kliring, juga perlu dijelaskan tugas dan fungsi dari unit kliring serta peran dari Dinas/SKPD dalam mendukung pembangunan SJ. Persiapan surat keputusan dilakukan bersama oleh tim kerja level Manager Menengah dan level pengambil kebijakan.

Pembuatan metadata merupakan langkah berikutnya untuk melaksanakan pengelolaan data, yang notabene merupakan aset pemerintah yang wajib dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat. Metadata apabila diartikan secara bebas bisa berarti sebuah informasi yang sangat rinci mengenai keberadaan data. Di dalam metadata semua informasi tentang sebuah data akan tersaji dengan rinci sebagai contoh, apa judul/nama data, tahun berapa dibuat, skalanya berapa, mencakup wilayah mana saja, sumber data diambil dari mana, milik siapa data tersebut, apabila ingin mendapatkan menghubungi siapa, alamatnya dimana, jam berapa, nomor teleponnya berapa, prosedurnya bagaimana, harganya berapa, dan lain-lain masih banyak lagi informasi yang disajikan. Satu data idealnya berisi 300 an informasi tentang data tersebut. Semua pertanyaan tentang satu data diatas dapat disajikan pada metadata. Setiap data idealnya dibuat metadatanya, sehingga keberadaannya akan lebih jelas apabila ada yang memerlukan dan terawat dengan baik.

Karena komunikasi pada program IDSN berbasiskan elektronik, maka perlu dibangun sistem clearinghouse/geoportal yang berfungsi sebagai portal/gateway/pintu gerbang pada unit kliring. Pintu gerbang komunikasi data dan informasi spasial yang letaknya pada unit kliring ini fungsinya mewakili seluruh Dinas/SKPD dalam satu SJ (provinsi). Dari clearinghouse/geoportal pada unit kliring ini akan dapat tersambung dengan Jaringan Data Spasial secara nasional. Jadi akan menyambungkan SJ setiap Provinsi di Indonesia ke JDSN secara elektronik. Dengan tersambungny jaringan tersebut maka seluruh informasi tentang data pada masing-masing provinsi yang telah disajikan pada metadata akan dapat diakses atau dinikmati oleh para pengguna di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia.

### **3. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Infrastruktur data spasial nasional (IDSN) dibangun agar setiap orang atau instansi dapat dengan mudah melakukan pengaksesan data spasial.
2. Dalam membangun IDSN, komponen-komponen yang diperlukan: kelembagaan, peraturan perundangan-undangan, data utama, penelitian dan pengembangan teknologi, sumber daya manusia.
3. Proses JDSN/IDSN meliputi: pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD, penetapan unit kliring, pembuatan metadata, pembangunan clearinghouse (gateway/pintu gerbang) simpul jaringan, standarisasi data spasial. Pembangunan simpul jaringan pada program IDSN akan dimulai dengan pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD.

Untuk mewujudkan pembangunan IDSN yang mampu menjamin tersedianya data dan informasi spasial berkualitas, mudah di akses dan diintegrasikan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai tingkat pusat maupun daerah diperlukan penyatuan persepsi, koordinasi dan komunikasi dari berbagai unsur terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [BAKOSURTANAL] Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. 2004. Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Versi 1. Cibinong: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
- B.J. Pratondo, dkk. 2006. Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12.
- [FGDC] Federal Geographic Data Committee. 2004. Framework Introduction and Guide. Virginia United States: The Federal Geographic Data Committee.
- Masser I. 2005. GIS Worlds Creating Spatial Data Infrastructures. California Redlands: ESRI Press.
- Ruchyat Deni Dj, dkk. 2007. Infrastruktur Data Spasial Nasional Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang1. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Infrastruktur Data Spasial Nasional, Hotel Atlet Century-Jakarta, 25 – 26 Juni 2007.